HILANGNYA PARA PENENUN PEREMPUAN

OLEH: **NURHADY SIRIMOROK**
Anggota Tim Pelaksana Kajian Rantai Nilai Sulawesi Selatan

Industri tenun sutra Sulawesi Selatan terkonsentrasi di Kabupaten Wajo. Ibukotanya, Sengkang, dijuluki kota Sutra. Sebelum dasawarsa 2000-an pelaku industri tenun sutra di kabupaten ini mencapai ribuan dan hampir semuanya adalah perempuan. Namun dalam 20 tahun terakhir jumlah penenun telah menurun drastis. Data statistik resmi menunjukkan jumlah mereka tersisa 151 orang saja. Apa yang terjadi, mengapa para perempuan itu meninggalkan kerja menenun?

NILAI SANG MAESTRO

Hadra adalah seorang penenun paling tersohor di Wajo. Ia menenun di sela waktu mengurus rumah dan mengajar mengaji anak-anak di kampungnya. Usia Hadra empat puluh lima tahun dan ia sudah mulai menenun sejak belum menikah.

Hadra tinggal di Tosora, sebuah desa yang dari waktu ke waktu ramai oleh para peziarah yang hendak mengunjungi makam dan masjid tua Kerajaan Wajo. Rumahnya cuma selemparan batu di belakang kompleks situs sejarah itu.

Di pekarangan samping rumah panggungnya yang sederhana, Hadra mengurai benang yang telah diwarnai. Gulungan benang itu bergantung di dua palang kayu yang terpaku ke dua tiang yang terpaut sekitar empat meter. Setelah kering ia gulung benang ke tabung silinder berbahan kayu untuk dipakai sebagai benang pakan. Helai benang yang ia sisipkan dari sisi kanan melewati barisan rapat ratusan helai benang lusi yang membentang tegang secara vertikal, berselang-seling, helai demi helai, sampai membentuk tenunan sarung.

Sesekali Hadra melakukan kesalahan. Ia bisa keliru menyisipkan benang pakan pada helai benang lusi di titik yang seharusnya, membuat motif tampak sungsang. Kesalahan semacam itu biasanya baru ia sadari setelah puluhan helai benang pakan ia sisipkan ke benang lusi, dan itu akan memaksanya mengurai kembali hasil tenunannya yang sudah terpasang rapat, lalu memulai lagi.

"Kalau ada yang salah begitu, saya langsung bikin teh, istirahat dulu," kata Hadra. Begitulah cara Hadra menenangkan diri setelah tahu telah membuang banyak waktu dan tenaga.

Hadra adalah satu dari 16 penenun mandiri yang menggunakan alat tenun tradisional bernama walida. Penenun lainnya sudah beralih menggunakan alat tenun yang lebih rumit dan besar, dengan modifikasi terbaru yang membuat pekerjaan lebih ringan. Alat tenun ini dinamai alat tenun bukan mesin atau ATBM.

Sebagai seorang penenun yang paling tersohor di kabupaten yang menjadi pusat penenun sutra di Sulawesi Selatan, Hadra dapat menenun motif sarung sutra paling tersohor, motif yang sama dengan nama kampungnya: motif *tosora*. Hanya pemesan berkantong tebal yang sanggup membayarnya menyelesaikan sarung dengan motif tersebut. Karena itu, ketika tidak sedang mengerjakan pesanan khusus, ia menenun dengan motif-motif lain.

"Saya tidak bisa menghitung berapa banyak motif yang sudah pernah saya tenun. Saya bisa buat sendiri motif baru kalau dibutuhkan. Orang-orang selalu membuat motif baru," ujar Hadra. Untuk seluruh keterampilan dan pengetahuan mendalam tentang tenun sutra, yang mendatangkan ketenaran bagi kampung, kabupaten, dan bahkan provinsi, Hadra dan penenun walida lain menerima kompensasi yang kurang sepadan. Harga untuk selembar sarung tenun sutra yang Hadra dan para penenun walida lainnya hasilkan berkisar 1,2 juta rupiah. Ini mungkin terlihat banyak. Namun jika angka itu memperhitungkan biaya produksi yang mencapai 365 ribu rupiah dan lama waktu menenun yang biasanya memakan waktu sebulan maka pendapatan Hadra per hari berkisar 28 ribu rupiah saja. Serendah itulah pasar menilai kreativitas sang maestro tenun tradisional dalam menciptakan motif atau menyelesaikan tenungan dengan tingkat kerumitan yang tinggi.

Hadra bernasib baik. Dengan pendapatan seperti itu, Hadra tidak harus terus menenun, dan sesekali bisa bereksperimen dengan motif, karena ia selalu bisa mengandalkan pendapatan utama dari suaminya yang petani. Apalagi tanggungan hidup Hadra kini jauh lebih ringan karena anaknya sudah menikah.

Tapi nasib baik Hadra tidak sama dengan kebanyakan perempuan yang bekerja sebagai penenun kontrak. Perempuan-perempuan seperti Saribulan.

BERTAHAN DALAM NESTAPA

Kain batik menutupi nyaris seluruh rambut Saribulan. Di antara rambutnya tampak helai-helai uban. Usianya mungkin sekitar limapuluh tahun.

Berdiri di pekarangan rumah panggung yang ia tinggali di Kampung Sutra, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, wajahnya dikuasai keraguan, atau kecemasan. Petang segera datang, Saribulan mungkin perlu mengerjakan berderet tugas rumah tangga yang menjadi

Para penenun tradisional menciptakan motif indah pada kain tenunan dengan tingkat kerumitan tinggi. Karya seni ini tercipta oleh pengalaman dan ketekunan, ironisnya keuntungan secara finansial tak seimbang dengan kreatifitas mereka.

tanggung jawabnya sebagai orang yang tinggal bersama keluarga adiknya. Ia tidak menikah.

Sejak menyelesaikan sekolah dasar Saribulan sudah bergelut dalam usaha penenunan sutra. Hampir setiap hari ia duduk di kolong rumah untuk menenun kain atau sarung, bergantung pesanan yang datang dari pengusaha yang menjadikannya sebagai penenun langganan atau penenun kontrak.

Sebagaimana penenun lain, untuk menenun selembar sarung, mereka butuh waktu tiga hari, bila mereka bekerja secara intensif mulai pukul delapan pagi sampai lima petang dan hanya jeda istirahat makan siang dan sholat.

Rentang upah seperti itu seolah bekerja untuk memastikan semua penenun kontrak seperti Saribulan hanya akan bekerja sebagai penenun kontrak sepanjang hidup mereka. Itu bahkan berlaku bagi penenun seperti Saribulan, yang memiliki alat tenun sendiri (sebagian besar penenun kontrak tidak punya alat tenun sendiri), dan tak punya tanggungan.

"Saya tidak berkeluarga, jadi hasil tenun sekarang sudah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari saya, misalnya untuk beli beras."

Pengalaman Saribulan sebagai penenun kontrak juga dialami oleh penenun lain yang menggunakan ATBM. Saat ini ada 135 penenun yang menggunakan ATBM di Kabupaten Wajo atau sekitar 90 persen dari seluruh penenun di wilayah tersebut.

Saribulan tidak selalu menjadi penenun kontrak. Ia pernah sukses mengembangkan usaha tenunnya sendiri hingga dijuluki pengusaha tenun skala kecil. Dahulu Saribulan bisa mengumpulkan modal dari hasil menenun. Saat itu kedua orang tuanya masih hidup dan membantunya memenuhi kebutuhan hidup. Seluruh pendapatannya dari menenun dapat ia tabung untuk beli alat tenun bukan mesin.

Sepuluh tahun lalu, Saribulan kehabisan modal. Ia bangkrut dan kembali menjadi penenun kontrak yang bergantung pada pesanan dari pengusaha tenun. Ini telah menjadi pengalaman yang lazim di kampung Sutra yang juga dijuluki Kampung Sabbe (*sabbe* dalam Bahasa Bugis berarti sutra).

"Kami penenun tentu mau menjual sarung atau kain dengan harga tinggi, tapi pembeli tidak

Pemasakan Kokon, salah satu bagian dari serangkaian proses produksi benang sutra. Harga benang yang mahal kadang tak seimbang dengan harga jual akhir kain sutra oleh penenun.

mau," katanya. Bagi pengusaha kecil seperti Saribulan, harga jual barang ditentukan oleh para pembeli, para pedagang kain yang banyak mendatangi kampungnya.

"Harga sarung atau kain terkadang rendah, sedangkan harga beli benang mahal, dan saya tidak bisa menahan barang sampai harga kembali tinggi karena orang yang saya pekerjakan butuh uang segera. Saya terpaksa jual sarung dengan murah untuk menggaji pekerja."

Para pembeli tahu kalau kain atau sarung tidak ia jual segera, Saribulan akan kehabisan modal untuk melanjutkan pekerjaan. Mereka memanfaatkan situasi ini dengan menawar murah.

"Beda dengan pengusaha tenun yang bermodal besar. Mereka bisa menumpuk sarung, nanti kalau harga sudah naik baru dijual. Pengusaha dengan modal besar masih bisa menggaji penenun sebelum menjual sarung," katanya.

Demikian lemah posisi tawar para penenun ini di hadapan pedagang. Mereka sangat khawatir tidak bisa mendapatkan pembeli sesegera mungkin. Mereka bahkan bisa menerima cara transaksi yang berat sebelah, yaitu dibayar dengan cara cicilan.

"Pembeli kain atau sarung terkadang membayar lunas, terkadang juga dicicil. Kain seharga 200 ribu biasanya dicicil tiga sampai empat kali." Tidak sedikit pengusaha tenun skala kecil yang akhirnya gulung tikar akibat tekanan harga dan batalnya pesanan.

Kenaikan harga benang menjadi tantangan yang lain bagi pengusaha tenun skala kecil. Harga benang yang naik memaksa mereka untuk mengurangi keuntungan, Sementara mustahil menaikkan harga tenunan produksi akibat posisi tawar mereka yang sangat lemah di hadapan para pedagang.

Sampai sekarang Saribulan tak sanggup mengembalikan taraf penghidupannya karena alasan yang sangat jelas, upah tenunan yang terlampau rendah. Setelah tiga dekade bekerja, menenun lembar demi lembar kain mewah yang orang kenakan dalam banyak pesta meriah, ia masih hidup dalam nestapa.

Sementara itu, para pengusaha tenun skala besar, seperti tetangga kampungnya sendiri, kita sebut saja Haji Ida, bernasib jauh lebih baik.

Proses produksi tenun sutra di Sulawesi Selatan didominasi oleh perempuan. meski posisi mereka teramat signifikan dalam bisnis ini, namun merekalah yang paling dirugikan oleh kebijakan yang bias gender dan tabiat pasar.

MEREKA BELUM AKAN BANGKRUT

Haji Ida sudah 32 tahun bekerja sebagai pengusaha tenun sutra. Ia mulai terlibat dalam usaha tenun tak lama setelah menikah, awalnya sebagai penenun lalu menjadi pengusaha. Haji Ida memesan tenunan kain dan sarung tenunan dari penenun dan menjualnya kepada pedagang. Para penenun langganan sehari-hari menyebutnya "bos".

Pada tahun-tahun awalnya sebagai pengusaha tenun sutra, Haji Ida bekerja dengan 10 penenun kontrak. Pada masa jayanya pada akhir 1990-an sampai pertengahan 2000-an, ia bisa mengantongi keuntungan yang melampaui pendapatan suaminya yang berdagang di pasar. Ketika itu Haji Ida mempekerjakan 70 penenun kontrak.

Sebagaimana pengusaha tenun skala besar, Haji Ida mampu membeli alat tenun bukan mesin dan meminjamkannya kepada setiap penenun kontraknya. Alat tenun itu diantarkan ke rumah penenun kontrak dan boleh simpan di sana sampai mereka putus hubungan kerja, biasanya karena penenun berhenti menenun atau berganti bos. Jumlah penenun kontrak seorang pengusaha dapat diketahui dari jumlah alat tenun milik sang bos yang masih beroperasi.

"Dulu kami tenun sarung Samarinda. Sangat sibuk waktu itu," kenang Haji Ida.

Dahulu banyak pedagang mendatangi rumahnya sejak pukul 4 pagi untuk membeli sarung. Sesekali ada juga pesanan pedagang yang diantarkan sendiri oleh Haji Ida. Mereka yang datang ke rumahnya rata-rata beli sepuluh atau dua puluh lembar. Pada masa itu, karena banyaknya pedagang yang datang ke rumahnya, ia tak jarang berbohong bahwa barang jualannya sudah habis, agar setiap pedagang langganannya bisa pulang membawa barang dagangan.

"Kadang-kadang kalau pedagang langganan sangat butuh, saya beri lima sarung saja untuk satu orang. Dibagi rata. Masalahnya, kadang satu orang pedagang bisa membeli seratus lembar sarung."

Ada masa-masa jeda ketika pedagang kurang banyak yang datang ke rumahnya, ditandai dengan menumpuknya sarung yang belum terjual di lantai rumahnya yang lapang. Pada saat-saat seperti itu suaminya akan membawa dan menjual barang-barangnya di Makassar.

Para penenun kontrak berbasis ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) berupah sangat kecil, hanya menerima 10 ribu rupiah per hari kerja dan untuk mengantongi pendapatan yang kecil itu mereka mesti bekerja setidaknya tiga hari.

Bagi Haji Ida masa-masa itu sudah lewat. Semakin sedikit pesanan datang kepadanya akhir-akhir ini. Bila dahulu ia menyambut pembeli siang dan malam setiap hari, kini mereka datang sekali dalam dua pekan, atau bahkan sekali sebulan.

Menurut Haji Ida ini terjadi karena ia sudah punya beberapa pesaing, termasuk mantan penenun kontrak yang sudah bekerja secara mandiri. Haji Ida kini hanya punya 20 penenun kontrak. Pukulan terakhir datang ketika pandemi COVID-19 memaksa pembatasan kontak sosial selama berbulan-bulan.

Haji Ida belum akan bangkrut sebagaimana dialami pengusaha tenun skala kecil. Haji Ida masih punya cukup modal untuk memesan kain sendiri lalu menjualnya kepada langganan lamanya yang masih datang membeli, meskipun jumlahnya sudah jauh lebih kecil. Dua puluh ATBM miliknya masih beroperasi.

Bila pengusaha seperti Haji Ida mampu bertahan dari guncangan, analisis terhadap pendapatan pengusaha tenun skala besar seperti Haji Ida bisa menjelaskannya.

Untuk setiap sarung yang dibuat dengan ATBM, mereka mengantongi laba 470 ribu rupiah. Sedangkan keuntungan dari penjualan sarung sutra dari penenun mandiri berbasis walida mencapai 300 ribu rupiah per lembar. Pengusaha tenun skala besar seperti Haji Ida yang memiliki 20 ATBM aktif, bisa menjual satu unit sarung per hari. Mereka pun mengantongi pendapatan paling besar dalam rantai nilai sutra di Sulawesi Selatan.

Haji Ida pun masih memiliki cukup modal untuk beralih usaha. Di ujung ruang tamunya tampak tumpukan pernak-pernik resepsi pernikahan seperti baju *bodo* dan kain-kain hiasan *lamming* (pelaminan).

ANCAMAN SERIUS INDUSTRI TENUN SULAWESI SELATAN

Sebuah Tim Pelaksana Kajian (TPK) dibentuk pada Juli 2020 untuk meneliti rantai nilai sutra di Sulawesi Selatan. Sebagai uji coba pelaksanaan kajian secara kolaboratif, tim ini beranggotakan akademisi, pegiat organisasi non-pemerintah (ornop), dan staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka menjalankan satu bagian

Meski menggunakan alat milik sendiri, penenun dengan alat tenun tradisional bernama walida tetap menerima upah yang amat kecil sehingga sulit bagi mereka untuk membangun usaha mandiri dengan penghasilan yang layak.

dari program *Knowledge to Policy* (K2P), program kerja sama antara Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Knowledge Sector Initiative (KSI), serta Yayasan BaKTI dan SRP Payo-Payo. Program ini secara umum hendak membangun proses penyusunan kebijakan berdasarkan pengetahuan, dengan rangkaian produksi komoditas sutra Sulawesi Selatan sebagai sasaran penelitian dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah provinsi sebagai solusi bagi masalah pengembangan sutra.

Sejak Agustus 2020 sampai Januari 2021, TPK berkutat dengan kajian ini. Mereka mengunjungi kabupaten Enrekang, Wajo, dan Soppeng untuk wawancarai puluhan petani, belasan penenun, serta sejumlah pengusaha, pedagang, dan perwakilan organisasi pemerintah yang terkait.

Dari analisis Tim Pelaksana Kajian inilah kita jadi tahu lebarnya ketimpangan di antara pelaku di sektor manufaktur tenun sutra Sulawesi Selatan menganga lebar. Para penenun kontrak berbasis ATBM seperti Saribulan hanya menerima 10 ribu rupiah per hari kerja, dan untuk mengantongi pendapatan yang kecil itu mereka mesti bekerja setidaknya tiga hari. Para penenun walida seperti Hadra tak jauh berbeda, mereka mesti menenun selama rata-rata dua bulan sebelum bisa menikmati pemasukan sekitar 28 ribu rupiah per hari.

Para pengusaha tenun skala besar sangat bisa menjual lebih dari satu sarung setiap hari dan meraup laba 470 ribu rupiah untuk setiap lembar sarung sutra yang ditenun dengan ATBM, dan 300 ribu rupiah untuk yang ditenun dengan walida. Artinya, bila para pengusaha tenun skala besar hanya bisa menjual selembar sarung dalam sehari, mereka tetap mengantongi 30 sampai 47 kali lipat dibandingkan para penenun. Dari setiap sarung yang terjual, keuntungan terendah para pengusaha tenun skala besar setara dengan upah kerja sebulan para penenun kontrak-jika mereka bekerja tanpa hari istirahat.

Ketimpangan ini akan semakin jelas bila kita melihat lebih jauh hitungan-hitungan TPK terhadap penambahan nilai di sepanjang rantai produksi sutra Sulawesi Selatan. Para penenun seperti Hadra dan Saribulan sejatinya berkontribusi paling besar dalam penambahan nilai sutra, dan mereka menerima pendapatan paling kecil.

Kalkulasi TPK terhadap penambahan nilai di sepanjang rantai produksi sutra menunjukkan betapa lebarnya ketimpangan di antara pelaku di sektor manufaktur tenun sutra di Sulawesi Selatan.

Akibat marginalisasi ekonomi itu, tidak sulit membayangkan para penenun meninggalkan pekerjaan mereka begitu terbuka kesempatan lain atau bila pekerjaan mereka berbenturan dengan kebutuhan keluarga. Ketimpangan ini menjadi ancaman besar bagi industri tenun sutra Sulawesi Selatan.

Tantangan yang dialami pengusaha tenun skala besar seperti Haji Ida adalah jika penenun kontrak tidak bekerja konsisten mengejar target pesanan dan bila ada penenun yang memutuskan berhenti. Dua soal ini biasanya bermuara pada alasan keluarga: penenun kontrak sibuk dengan beraneka urusan rumah tangga sehingga mengabaikan tenunan atau bahkan meninggalkan profesi itu.

Sementara mereka yang masih bertahan, terutama penenun kontrak seperti Saribulan, kebanyakan tak punya pilihan penghidupan yang lebih layak. Perempuan-perempuan yang bertahan, karena menjadi pencari nafkah utama, sebagai kepala keluarga, maupun yang tidak menikah, biasanya harus terus menekuni penghidupan sebagai penenun.

Para perempuan penenun ini dipaksa hidup dalam kerentanan. Guncangan sekecil apa pun sanggup melempar mereka keluar dari rantai produksi sutra.

HILANGNYA PARA PELAKU KECIL

Lantas mengapa ketimpangan dan marginalisasi ini bisa bertahan cukup lama dalam gelap? Mengapa pengalaman para penenun perempuan ini hilang dari perhatian publik?

Boleh jadi, statistik resmi yang memuat data para penenun memainkan peran dalam hal ini.Dalam data statistik yang diterbitkan pemerintah, para penenun dipilah berdasarkan alat tenun (walida dan ATBM), tempat tinggal (desa dan kecamatan), atau skala usaha (pelaku usaha besar dan kecil). Pemilahan yang teknokratik dan administratif semacam ini dapat menyamarkan situasi sulit yang dihadapi pelaku industri tenun sutra skala kecil.

Dengan menggunakan metodologi berbeda, TPK menemukan tiga kategori penenun menurut posisi sosial mereka di hadapan aktor lain seperti

pengusaha skala besar: sebagai penenun mandiri, langganan, pekerja. Pemilahan ini bertumpu pada kepemilikan alat tenun, modal, dan pembagian pendapatan dari produksi tenunan.

Dengan cara inilah TPK menunjukkan bahwa para penenun kontrak dan penenun pekerja kebanyakan tidak memiliki alat tenun, menerima upah yang rendah, dan karenanya sulit menghimpun modal guna meningkatkan taraf hidup mereka. Sementara penenun yang memakai walida, walaupun menggunakan alat milik sendiri, tetap menerima upah yang terlalu kecil sehingga sulit bagi mereka untuk membangun usaha mandiri yang berpenghasilan layak.

Statistik pemerintah yang memilah berdasarkan alat juga menyembunyikan gambaran mengenai tingkat pendapatan para penenun menurut posisi sosial mereka. Pemilahan unit 'usaha rumah tangga' dan 'usaha pertenunan' dalam statistik resmi dapat dengan mudah menyamarkan ketimpangan antara penenun yang memiliki banyak alat, sedikit alat, dan tidak punya alat, demikian pula ketimpangan antara mereka yang berpendapatan besar dan kecil.

Kealpaan data yang secara akurat menyajikan situasi para pelaku kecil - penenun dan pengusaha tenun skala kecil, sangat mungkin menyulitkan perancangan kebijakan dan program yang tepat guna mendukung para pelaku yang betul-betul butuh.

Buktinya cukup jelas: seluruh penenun yang diwawancarai TPK mengaku belum pernah menerima pelatihan atau bantuan lain dalam bentuk apa pun. Bahkan, tampak indikasi bahwa pelatihan-pelatihan tersebut hanya diakses oleh penenun-penenun tertentu.

Melihat kelemahan data di atas, mengingat bahwa seluruh penenun adalah perempuan, sungguh sulit menghindari kesan hadirnya bias gender yang cukup parah dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam rantai produksi tenunan sutra Sulawesi Selatan.

Bias itu menyamarkan pengalaman para pelaku kecil industri tenun sutra seperti Hadra dan Saribulan, yang hanya bisa bertahan dalam kesusahan sampai mereka terlempar keluar dari rantai produksi.

Sementara tabiat pasar terus menggencet mereka di antara harga bahan baku dan harga jual, serta memerangkap mereka dalam hubungan kontrak yang merugikan; data statistik menyembunyikan situasi buruk mereka, dan mencegah negara dan publik untuk tahu dan bertindak.

Bias gender dalam proses-proses kebijakan dan mekanisme pasar memang cenderung menghasilkan ketimpangan, dan ketimpangan dalam industri tenun sutra Sulawesi Selatan berarti hengkangnya para perempuan dari kerja menenun. Ini sebuah ancaman mematikan bagi industri sutra di Sulawesi Selatan.

Tanpa campur tangan serius pemerintah, mekanisme pasar yang kini bekerja akan terus menghasilkan ketimpangan. Tanpa mengubah proses kebijakan yang bias gender, para perempuan pelaku kecil akan sulit terlihat dan punya peluang untuk menyuarakan kebutuhan nyata mereka. Tanpa semua intervensi itu, ketimpangan yang bertahan lama akan menghabiskan para perempuan penenun yang menua. Sementara perempuan dari generasi baru akan mencari penghidupan yang lebih layak bahkan sebelum menyentuh alat tenun.

Setelah impor ulat dan benang sutra mengalir ke Sulawesi Selatan, barangkali kita akan menyaksikan impor kain dan sarung sutra yang dijual sebagai karya perempuan penenun Wajo.■

KNOWLEDGE SECTOR INITIATIVE
AUSTRALIA-INDONESIA PARTNERSHIP

BaKTI
BURSA PENGETAHUAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Program ***Knowledge to Policy Pilot*** (K2P), Anda dapat menghubungi:
Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia)
Jl. Daeng Ngeppe 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia
(62-411) 832228 / 833383 (62-411) 852416
info@bakti.or.id